

INTERNASLISASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI PEMBELAJARAN PAI DI SD AR-ROUDHOH KABUPATEN PASURUAN

Zunia Zahrotut Tazkiyah, Faridah Ulvi Na'imah

Universitas Abdul Chalim Mojokerto

niatazkiyah@gmail.com, faridaulvi@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine the process of internalizing anti-corruption education through learning Islamic Religious Education (PAI) at Ar Roudhoh Elementary School, Pasuruan Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Research subjects included school principals, PAI teachers and class teachers, student guardians, and students at Ar Roudhoh Elementary School, Pasuruan Regency. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The research results show that the process of internalizing anti-corruption education through PAI learning started with the Minister of Education's initiative to integrate independent curriculum-based learning with anti-corruption education. Some of the efforts made by school residents to implement anti-corruption education include early year outreach, honesty canteen programs, additional learning on Saturdays, as well as posting slogans or images that warn about corrupt behavior. The values conveyed in anti-corruption education include honesty, independence, caring, discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage and justice. Supporting factors in this implementation include support from the school community, availability of teaching modules, and innovation in school programs. Meanwhile, inhibiting factors include the diverse backgrounds of students, limited textbooks and infrastructure, lack of written socialization, and lack of student enthusiasm for school programs.*

Keyword: *Internalization, Anti-Corruption Education, Islamic education*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses internalisasi pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian meliputi Kepala Sekolah, Guru PAI dan Guru Kelas, Walimurid, dan peserta didik SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses internalisasi pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran PAI dimulai dari inisiatif Menteri Pendidikan untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka dengan pendidikan anti korupsi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi meliputi sosialisasi awal tahun, program kantin kejujuran, pembelajaran tambahan pada hari Sabtu, serta pemasangan slogan atau gambar yang mengingatkan tentang perilaku koruptif. Nilai-nilai yang disampaikan dalam pendidikan anti korupsi mencakup kejujuran, kemandirian, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan

keadilan. Faktor pendukung dalam implementasi ini meliputi dukungan dari warga sekolah, tersedianya modul ajar, dan inovasi program sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi latar belakang peserta didik yang beragam, keterbatasan buku ajar dan sarana prasarana, kurangnya sosialisasi tertulis, serta kurangnya antusiasme peserta didik terhadap program sekolah.

Kata Kunci: Internalisasi, Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia di waktu ke belakang ini telah banyak mengalami masalah yang cukup pelik dan serius seputar krisis multi dimensional yang secara tidak langsung menuntut pemerintah untuk segera mengupayakan penyelesaian masalah. Salah satunya adalah permasalahan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau krusial yang sudah menjadi bahaya laten yang selalu menghantui dan terus menerus menggerogoti moral sosial masyarakat secara dinamis dan menelan etika tatanan pemerintahan yang seharusnya bersih dari cela dan berwibawa.¹

Akar penyebab terjadinya kasus korupsi terbilang sistematis, dimulai dari proses pemilihan kepala daerah, yang sering disebut sebagai pilkada, yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pembiayaan tersebut cenderung mahal karena setiap calon pemimpin daerah diharapkan untuk membayar mahar politik yang besar, sebagai jaminan kemenangan dan akuisisi berbagai bentuk properti. Oleh karena itu, perhatian para pejabat daerah sering kali terbagi antara upaya memenuhi janji-janji kampanye, yang diumumkan dengan penuh semangat dan tegas saat menjadi calon, dan upaya mengembalikan modal awal yang telah diinvestasikan.²

Di sisi lain, yang terancam adalah moralitas bangsa yang telah tergerus oleh kebiasaan yang tertanam dalam pikiran bawah sadar bahwa banyak pejabat pemerintah merasa kehilangan rasa malu jika terlibat sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Akibatnya, tindakan kriminal yang sangat merugikan dan berbahaya pun menjadi lebih mudah dilakukan dan diterima sebagai bagian dari

¹ Henky Fernando, Yuniar Galuh Larasati, dan Syahrul Akmal Latif, "Diseminasi simbolik: Makna korupsi dalam media sosial Instagram." *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 8.1 (2022), 81-82.

² Noer Fadilah Raissoevel. "Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020)". BS thesis. 2022.

budaya. Selain itu, terdapat beberapa alasan yang menjadi justifikasi bagi para pelaku, seperti klaim bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan pihak lain atau merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama.³

Korupsi di Indonesia telah merajalela di semua lembaga dan aspek kehidupan di negara ini. Fenomena ini menyebar tanpa kecuali, bahkan menimbulkan keheranan di kalangan masyarakat saat kasus korupsi juga terjadi di Departemen Agama, sebuah lembaga yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi seluruh warga Indonesia. Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi sumber inspirasi dan pelopor dalam memerangi korupsi, Departemen Agama seharusnya memainkan peran utama dalam mempromosikan nilai-nilai moral dan spiritual baik secara individual maupun kolektif.⁴

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dan memberantas praktik korupsi di Indonesia, namun tantangan tersebut masih terus berlanjut. Kita menyadari bahwa menangani masalah korupsi di Indonesia bukanlah hal yang sederhana dan tidak dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang terpisah. Untuk mengatasi korupsi secara menyeluruh di Indonesia, diperlukan pendekatan yang komprehensif, holistik, dan terstruktur. Tindakan parsial tidak akan cukup. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korupsi di Indonesia telah merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pemerintahan, dan sudah menjadi bagian integral dari budaya, perilaku, dan pola pikir masyarakat. Selain itu, masalah ini telah mencapai tingkat yang rumit dan sulit untuk diatasi dengan cepat, bahkan telah meresap ke dalam dimensi psikologis yang kompleks.⁵

Pendidikan dianggap memiliki potensi untuk membentuk mentalitas sejak dini karena dapat berperan sebagai sarana untuk mencegah anak-anak dari perilaku korupsi sejak usia dini. Selain itu, upaya memberantas korupsi juga memerlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Proses pembelajaran atau adaptasi individu terhadap nilai-nilai budaya dan aspirasi masyarakat sering

³ Ahmad Baedowi, *Potret Pendidikan Kita*. (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2015), 5

⁴ Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4.1 (2022), 44.

⁵ Rizky Ramadhani, "Formation Of Anti-Corruption Character In The Younger Generation Based On Pancasila Ideology." *JURNAL SETIA PANCASILA* 4.2 (2024), 42

disebut sebagai pendidikan. Ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan mencapai tujuan mereka dengan baik.⁶

Istilah "Pendidikan Anti korupsi" mewakili konsep pemberantasan korupsi melalui penggabungan antara pendidikan karakter dan pendidikan negara. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghilangkan korupsi melalui pendidikan yang mencakup nilai-nilai moral dan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini juga seharusnya diterapkan dalam konteks pendidikan berbasis agama, sebagai bagian yang menyatu dalam sistem pendidikan nasional.⁷ Harapannya, pendidikan dapat memegang peran yang sangat krusial dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan harus berupaya keras untuk memperjuangkan dan mempromosikan nilai-nilai anti-korupsi, mengingat bahwa korupsi merupakan penyakit moral yang merusak struktur sosial. Pendidikan juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter siswa yang memiliki moralitas yang tinggi dan perilaku yang baik. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.⁸

SD Ar-Roudhoh Kabupaten Pasuruan, sebagai institusi pendidikan dasar, memiliki peran strategis dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika siswa sejak dini. Mata pelajaran PAI, dengan fondasi nilai-nilai Islam yang kuat, memiliki potensi besar untuk menjadi sarana efektif dalam menginternalisasi pendidikan antikorupsi. Namun, tantangan besar muncul dalam mengintegrasikan konsep-konsep antikorupsi ke dalam kurikulum dan pembelajaran PAI.

Kurangnya pemahaman tentang konsep antikorupsi, serta keterbatasan sumber daya dan pandangan yang terbatas tentang peran pendidikan dalam pencegahan korupsi, dapat menjadi kendala utama dalam proses internalisasi

⁶ Roni Ekha Putera, et al. "Sosialisasi Dan Edukasi Integritas Anti Korupsi Era Revolusi Industri 4.0 Di SMPN 13 Kota Padang." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.5 (2023), 9928

⁷ Amat Budiman, *Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

⁸ Nita Amelya, et al. "Penguatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Sekolah Sebagai Strategi Upaya Pencegahan Korupsi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.18 (2023), 1009

pendidikan antikorupsi di SD Ar-Roudhoh. Diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai antikorupsi tidak hanya diajarkan sebagai konsep, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari siswa.

PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Pemahaman tentang pendidikan antikorupsi masih terbatas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penjelasan berikut, diuraikan apa itu pendidikan antikorupsi dan mengapa penting untuk dilakukan. Secara umum, pendidikan antikorupsi didefinisikan sebagai proses pembentukan ulang budaya yang bertujuan untuk memperkenalkan pola pikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.⁹ Pentingnya memperkenalkan pola pikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik karena korupsi telah menjadi budaya dalam masyarakat dan dikhawatirkan generasi muda akan menganggap korupsi sebagai hal yang wajar.

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya yang disengaja dan terorganisir yang diberikan kepada peserta didik dengan tujuan memberikan pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar mereka mau dan mampu untuk mencegah serta menghilangkan kesempatan untuk korupsi. Tujuan akhirnya adalah bukan hanya untuk menghilangkan peluang korupsi, tetapi juga agar peserta didik memiliki kemampuan untuk menolak segala pengaruh yang dapat mendorong perilaku koruptif.¹⁰

Setiap usaha dalam pendidikan memiliki target khusus, termasuk pendidikan antikorupsi. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah:

1. Pengembangan pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai jenis korupsi beserta aspeknya.
2. Perubahan pandangan dan sikap terhadap tindakan korupsi.
3. Pengembangan keterampilan dan keahlian baru yang diperlukan untuk mengatasi korupsi.

⁹ Rinja Efendi dan Asih Ria Ningsih, *Pendidikan Karakter di Sekolah*. (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022), 10

¹⁰ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 3

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat diamati bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan tiga domain penting: kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Pertama*, dalam aspek kognitif, fokusnya adalah pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang dipelajari, serta kemampuan untuk menggabungkan cara-cara kreatif atau mensintesis ide-ide dan materi baru. *Kedua*, dalam domain afektif, perhatian diberikan pada aspek emosional, sikap, apresiasi, nilai, atau tingkat penerimaan atau penolakan terhadap suatu hal. *Ketiga*, dalam domain psikomotorik, perhatian tertuju pada tujuan melatih keterampilan dan kecakapan.¹¹ Untuk mempersiapkan peserta didik agar terampil dalam perilaku antikorupsi, pendidikan antikorupsi harus mengintegrasikan ketiga domain tersebut dalam kurikulum, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, tujuan pendidikan antikorupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria yang dapat diukur.

Penyebab Korupsi

Faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya korupsi meliputi:

1. Motivasi Internal Pelaku Korupsi

Ditinjau dari perspektif individu yang melakukan korupsi, faktor-faktor yang mendorong tindakan tersebut seringkali berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri, yang dapat diartikan sebagai keinginan, motivasi, atau kesadaran mereka untuk beraksi. Beberapa alasan yang mendorong seseorang melakukan korupsi meliputi¹²:

a) Katamakan Manusia

Seseorang yang terlibat dalam korupsi seringkali merupakan mereka yang sudah memiliki pendapatan tinggi, bahkan melebihi apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Dalam kondisi demikian, tidak peduli seberapa besar kekayaan atau pendapatan yang telah mereka kumpulkan,

¹¹ Abd Aziz, Nia Indah Purnamasari, dan Zaini Tamin AR. "Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Usia Dini di Tk Al Amin Klampis Bangkalan." *Aulada: Jurnal Pendidikan dan Perkembangan anak* 3.1 (2021), 90

¹² La Hadifa, *Membangun Budaya Anti Korupsi: Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, (Kendari: CV. Adiprima Pustaka, 2019)

jika terdapat kesempatan untuk berkorupsi, mereka cenderung akan mengambil kesempatan tersebut.

b) Integritas yang Rendah Terhadap Godaan

Seseorang dengan integritas yang rendah lebih rentan terhadap korupsi akibat godaan. Pegawai bisa tergoda untuk berkorupsi oleh berbagai sumber, termasuk atasan, rekan sekerja, bawahan, atau pihak eksternal yang mereka layani.

c) Pendapatan Tidak Memadai untuk Kebutuhan Sehari-hari

Ketika pendapatan seseorang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari yang layak, ia mungkin merasa terpaksa mencari sumber penghasilan tambahan. Usaha mencari pendapatan tambahan ini dapat berbentuk korupsi, seperti penggunaan waktu, pikiran, dan tenaga yang seharusnya dialokasikan untuk tugas-tugas resmi malah dialihkan untuk kegiatan lain di luar tanggung jawab pekerjaannya.

d) Kebutuhan Mendesak

Ketika seseorang dihadapkan pada kebutuhan mendesak, seperti biaya kebutuhan keluarga, membayar hutang, pengobatan yang mahal, atau biaya pendidikan anak-anaknya, hal ini dapat mendorong seseorang dengan pendapatan yang terbatas untuk terlibat dalam praktik korupsi.

e) Gaya Hidup Materialistik

Gaya hidup yang materialistik di kota-kota besar seringkali mendorong seseorang untuk mengejar kepemilikan mobil mewah, rumah mewah, pakaian bermerk, hiburan mahal, dan lain sebagainya. Gaya hidup yang materialistik ini dapat menyebabkan seseorang merasa bahwa pendapatannya yang terbatas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam situasi ini, individu cenderung tergoda untuk terlibat dalam korupsi ketika kesempatan untuk melakukannya muncul.

f) Kurang Semangat atau Enggan Bekerja Keras

Seseorang yang terlibat dalam korupsi mungkin merupakan individu yang ingin segera memperoleh keuntungan besar, tetapi tidak memiliki semangat atau tidak mau bekerja keras untuk meningkatkan pendapatannya secara legal.

g) Penerapan Ajaran Agama yang Kurang Tepat

Secara umum, pelaku korupsi seringkali adalah seseorang yang memiliki keyakinan agama. Meskipun mereka memahami ajaran-ajaran agama yang mereka anut, yang mengecam praktik korupsi, namun pada kenyataannya mereka masih terlibat dalam tindakan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak ajaran agama yang tidak diterapkan dengan benar oleh para penganutnya.¹³

2. Faktor Organisasi

Organisasi, dalam konteks ini, merujuk pada entitas yang terdiri dari berbagai sistem organisasi dalam masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau menjadi tempat terjadinya korupsi sering kali berkontribusi pada munculnya tindakan korupsi dengan membuka peluang atau kesempatan bagi korupsi terjadi. Beberapa penyebabnya meliputi:

a) Kurangnya Keteladanan dari Pemimpin

Dalam suatu organisasi, baik itu kepemimpinan formal maupun informal (seperti tokoh-tokoh senior), memiliki peran sebagai contoh bagi setiap anggota atau individu yang terkait dengan organisasi tersebut. Apabila para pemimpin tersebut menunjukkan pola hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota organisasi cenderung akan mengikuti gaya hidup yang serupa.

b) Tidak Adanya Kultur Organisasi yang Benar

Budaya atau norma-norma yang ada dalam suatu organisasi seringkali memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggotanya, terutama dalam kebiasaan, perspektif, dan sikap mereka terhadap situasi tertentu. Kebiasaan ini cenderung menular ke anggota lainnya dan kemudian menjadi norma di lingkungan tersebut. Misalnya, di beberapa bagian dari organisasi, dapat muncul budaya memberi suap, memberikan "amplop", memberikan hadiah, dan sebagainya, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi organisasi tersebut.

¹³ Ola Rongan Wilhelmus, "Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya." *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 17.9 (2017), 36-40.

c) Kekurangan Memadainya Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah

Pada organisasi di mana setiap unit memiliki sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai, penggunaan sumber daya selalu dihubungkan dengan pencapaian sasaran tersebut, sehingga setiap aspek kuantitas dan kualitas sumber daya dapat dimonitor dengan baik. Namun, dalam banyak instansi pemerintah, visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas untuk mencapai misi tersebut belum terdefiniskan dengan baik. Selain itu, pemantauan kinerja unit-unit organisasi cenderung hanya memperhatikan tingkat penggunaan sumber daya (input), tanpa memperhatikan pencapaian sasaran yang seharusnya telah ditetapkan (output). Akibatnya, sulit bagi instansi pemerintah untuk dievaluasi apakah mereka berhasil mencapai tujuan mereka atau tidak. Keadaan ini menciptakan lingkungan organisasi yang rentan terhadap praktik korupsi.

d) Lemahnya Sistem Pengendalian Manajemen

Di organisasi yang memiliki sistem pengendalian manajemen yang lemah, kemungkinan lebih besar bagi pegawai untuk terlibat dalam korupsi dibandingkan dengan organisasi yang memiliki pengendalian manajemen yang kuat. Seorang pegawai yang menyadari bahwa sistem pengendalian manajemen di tempat kerjanya tidak efektif, akan melihat adanya peluang untuk melakukan korupsi.¹⁴

e) Manajemen Cenderung Menyembunyikan Korupsi dalam Organisasi

Pada umumnya, manajemen dalam organisasi di mana terjadi korupsi cenderung enggan membantu mengungkapkan tindakan korupsi tersebut, meskipun mereka tidak terlibat langsung. Kemungkinan keengganan ini muncul karena takut terungkapnya praktik korupsi di dalam organisasi mereka. Akibatnya, manajemen cenderung untuk menyembunyikan korupsi yang terjadi dan mencoba menyelesaikannya sendiri, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi dan memicu timbulnya praktik korupsi lainnya.

¹⁴ Medan, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkat Di Indonesia." *Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah* 16.1 (2015), 5210.

Dampak dari Tindakan Korupsi

Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan bersama dalam suatu negara karena menimbulkan perilaku yang tidak bermoral, kecurangan, serta merusak prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. Penyelewengan dana yang terjadi akibat korupsi telah mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Pada skala besar, pengalihan dana publik ke dalam kantong pribadi telah mengurangi kapasitas negara untuk menyediakan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, riset, dan pembangunan infrastruktur. Di tingkat individu, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian tentang kualitas pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.¹⁵

Dampak lain dari korupsi meliputi hal-hal berikut:

1. Penurunan moral, integritas, dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.
2. Membawa dampak negatif pada ekonomi negara.
3. Korupsi menyebabkan penurunan semangat kerja masyarakat.
4. Menyebabkan eksploitasi sumber daya alam oleh sekelompok individu.
5. Memiliki dampak sosial dengan menurunnya modal manusia.¹⁶

Korupsi selalu mengakibatkan dampak negatif pada proses demokratisasi dan pembangunan, karena tindakan korupsi telah merusak dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses politik melalui praktik money politics. Selain itu, korupsi juga telah mengganggu pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan publik, menghilangkan akuntabilitas publik, dan mengabaikan prinsip the rule of law. Di sisi lain, korupsi menghasilkan proyek pembangunan dan fasilitas umum yang berkualitas rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat tercapainya pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.¹⁷

¹⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 40

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 8

¹⁷ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, Cet I, 2011), 9

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan melalui pendekatan kualitatif. Subjek penelitian meliputi Kepala Sekolah, Guru PAI, Guru Kelas, Walimurid, dan peserta didik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber. Penelitian ini mengandalkan dua sumber data: data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait.

HASIL PENELITIAN

Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pembelajaran PAI Di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan

Internalisasi pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran PAI di SD Ar Roudhoh terbentuk sejak tahun 2022 semenjak pemberlakuan kurikulum merdeka yang diintegrasikan oleh Kemendikbudristek (kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi) dengan pendidikan anti korupsi. Oleh karenanya, kepala sekolah dan guru di SD Ar Roudhoh berinisiatif untuk mengadakan berbagai kegiatan serta hal-hal yang mendukung inovasi pemerintah melalui pendidikan untuk meminimalisir korupsi di Indonesia melalui materi pendidikan anti korupsi yang di bungkus dengan rapi dalam pembelajaran berbasis kurikulum merdeka.

1. Kegiatan dalam internalisasi pendidikan anti korupsi

SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung dalam internalisasi pendidikan anti korupsi terutama didalam pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Berdasarkan data-data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lembaga tersebut, dapat disimpulkan bahwa internalisasi pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran PAI di SD Ar Roudhoh dimulai sejak tahun 2022 diawali dengan sosialisasi di awal tahun semenjak Kemendikbudristek memberlakukan pembelajaran di sekolah berbasis kurikulum merdeka. Diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi

merupakan inisiatif dari kepala sekolah sebagai desiminasi kepada peserta didik yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, sebelumnya tidak tahu menjadi tahu dan sebelumnya tidak diterapkan menjadi diterapkan melalui pembelajaran.

Sosialisasi pendidikan anti korupsi telah melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah meliputi tenaga pendidik (staff dan guru), tenaga kependidikan (staf tata usaha) dan peserta didik. Narasumber saat sosialisasi penyampaian pendidikan anti korupsi di sekolah setiap awal tahun adalah kepala sekolah dan guru agama.

Selain sosialisasi diadakan secara lisan, sosialisasi secara tertulis pun turut dilakukan seperti slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sosialisasi secara tertulis ini bertujuan sebagai pengingat untuk warga sekolah agar lebih memahami tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan sikap koruptif dimasa yang akan datang.

Selain itu, pendidikan anti korupsi diterangkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama islam juga telah terdesain melalui pembelajaran yang diletakkan di hari Sabtu dan untuk setiap minggunya sudah di integrasikan di setiap mata pelajaran yang sudah ada dikurikulum yang berbasis kurikulum merdeka. Terlebih pada pembelajaran yang bermuatan moral seperti pendidikan agama islam. Secara tidak langsung, pendidikan agama adalah pembentukan moral yang kompleks sesuai dengan tuntutan agama. Karena tidak ada agama yang menyuruh pengikutnya untuk berbuat tercela dan keluar dari koridor agama serta negara.

Pendidikan anti korupsi juga di dukung oleh lembaga sekolah dengan adanya kantin kejujuran. Tujuan utama kantin kejujuran ini diadakan agar peserta didik mampu mempraktekkan salah satu nilai anti korupsi berupa kejujuran setelah melakukan pembelajaran atau pembahasan materi di kelas. Pembentukan karakter yang diharapkan berhasil untuk meminimalisir angka kasus korupsi di Indonesia. Pembiasaan-pembiasaan kecil ini memang harus

diterapkan sejak dini agar peserta didik terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan jauh dari kejahatan.

Selanjutnya, diterbitkanlah modul pembelajaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK. Sebuah instansi yang memberikan materi didalamnya berupa nilai-nilai anti korupsi sebagai pembentukan karakter generasi bangsa seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan. Dengan adanya modul ini diharapkan pembelajaran pendidikan anti korupsi berjalan secara sistematis dan efektif. Selain itu, nilai-nilai dalam pembentukan karakter dapat ditanamkan melalui pembiasaan dalam keseharian dari aktivitas peserta didik seperti sholat dhuha, bakti sosial, gotong royong, latihan kurban, kegiatan kegamaan, dan lain-lain.

2. Nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan anti korupsi

Berdasarkan rencana yang disusun oleh KPK dalam menginternalisasikan pendidikan anti korupsi kepada generasi penerus bangsa di lembaga sekolah adalah pembentukan budaya anti korupsi melalui pendidikan profesional. Substansi adanya modul pendidikan anti korupsi yang harus diterapkan dalam pembiasaan kehidupan sehari-hari oleh generasi emas harapan bangsa memiliki nilai-nilai anti korupsi sebagai berikut:

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan perbuatan yang murni berdasarkan pada usaha seseorang dalam menjadikan dirinya sebagai manusia yang selalu dapat dipercaya baik dalam hal perkataan, perbuatan maupun pekerjaan yang sudah dilakukan. Ketika seseorang dengan sengaja bertindak tidak jujur maka ia akan sulit untuk kembali dipercaya oleh orang lain maupun orang terdekatnya sekalipun. Karena sekali berbohong sama dengan satu kali kehilangan seorang yang selalu mempercayai kita. Oleh karenanya, berperilaku jujur itu sangat penting dan perlu untuk ditanamkan sejak dini serta dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar dimasa mendatang tidak mendatangkan masalah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Nilai kejujuran di sekolah dapat dilakukan oleh peserta didik melalui bentuk tindakan dengan tidak melakukan kecurangan saat pembelajaran berlangsung seperti tidak mencontek saat ujian maupun ulangan harian yang diberikan oleh guru, tidak memalsukan nilai yang diberikan oleh guru hanya agar tidak dimarahi orang tua saat pulang sekolah, tidak mencuri, tidak suka bohong, dan lain-lain.

Strategi untuk menanamkan nilai kejujuran di peserta didik dalam internalisasi pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran PAI di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan yaitu dengan melakukan beberapa hal diantaranya seperti terdapat kantin kejujuran. Aktivitas yang dilakukan di kantin kejujuran adalah penuh menilai peserta didik dari kejujuran yang dilakukan. Terlebih memiliki tujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar selalu bersikap jujur disetiap perilaku yang dilakukan.

b. Kepedulian

Nilai-nilai pendidikan anti korupsi salah satunya adalah sikap kepedulian. Nilai kepedulian ini dapat diwujudkan oleh peserta didik melalui berbagai macam cara diantaranya memiliki usaha untuk antusias dalam mendengarkan guru ketika menerangkan pembelajaran di kelas, melaksanakan setiap peraturan dan perintah yang diberikan oleh sekolah dan guru. Selain itu, nilai kepedulian juga dapat diwujudkan di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah seperti membantu temannya saat sedang terjatuh, berbagi makanan saat ada teman yang tidak diberi saku oleh orang tuanya, berbakti dan selalu membantu orang tua.

Penanaman nilai kepedulian di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan juga sudah dihimbau dan ditekankan kepada seluruh warga sekolah untuk membantu satu sama lain, tidak membully sesama teman, saling berbagi kepada teman yang lebih membutuhkan, menjenguk teman yang sakit, menjenguk teman yang sunat, menghibur teman yang sedih, mengumpulkan dana dengan sukarela untuk membantu teman yang terkena musibah ataupun membantu guru yang sedang kesulitan membawa barang bawaan, dan lain-lain.

Selain itu, antara guru dan peserta didik memiliki komunikasi dan interaksi yang baik, hal itu terjadi dikarenakan kebiasaan yang ditetapkan di sekolah dengan menerapkan budaya 5S ketika saling bertemu yaitu sapa, salam, senyum, sopan dan santun. Sehingga hal kecil inilah yang menjadikan interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa sangat bagus. Karena peneliti juga mengamati bahkan di waktu jam istirahat ketika guru dan peserta didik saling berpas-pasan, peserta didik salim kepada gurunya dengan menyapa dan tersenyum dengan sopan dan santun.

c. Kemandirian

Nilai kemandirian dapat diwujudkan oleh peserta didik di SD Ar Roudhoh adalah dengan mengerjakan ujian secara mandiri tanpa mencontek dan percaya diri dengan kemampuan diri sendiri serta memahami penuh bahwa itu adalah tanggungjawabnya sebagai peserta didik.

Selain itu, nilai kemandirian juga bisa diwujudkan dengan cara peserta didik mengambil keputusan sendiri tanpa pengaruh orang lain. Nilai kemandirian sangatlah banyak, oleh karenanya bisa dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah seperti memakai seragam sekolah sendiri, menyiapkan pelajaran sekolah sendiri, belajar sebagai seorang peserta didik secara mandiri tanpa disuruh, dan lain-lain.

d. Kedisiplinan

Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan mampu fokus pada tanggungjawabnya sebagai peserta didik.

Pembiasaan dalam berperilaku disiplin di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan ini telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya tata tertib sekolah, dimana di dalamnya mencakup aturan-aturan tentang pemakaian seragam, waktu belajar peserta didik, dan perilaku peserta didik serta sanksi yang akan di dapatkan apabila aturan-aturan tersebut dilanggar berupa dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan sekolah

seperti membaca kegiatan keagamaan yang telah ditinggalkan. Tetapi kenyataan di lapangan, masih ada guru dan peserta didik yang kurang disiplin dalam hal waktu. Misalnya masih banyak peserta didik yang ketika jam istirahat sudah berakhir belum memasuki kelas dan masih memakan jajanan di luar kelas. Hal ini juga disebabkan oleh guru yang juga terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat berakhir.

e. Tanggungjawab

Nilai tanggung jawab dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, serta menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Misalnya ketika peserta didik terpilih sebagai pengurus kelas, maka ia mengemban tanggung jawab untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ketika terpilih menjadi ketua kelas, berarti peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk memimpin kelas dengan baik. Ataupun jika terpilih menjadi bendahara kelas, berarti siswa mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan kelas dengan baik pula. Bila menjadi keamanan kelas juga harusnya bertanggung jawab dalam mengamankan anggota kelas dari pertengkaran, peributan, keluar kelas dan pembullying.

Tanggung jawab juga penting untuk dilakukan ketika berbuat kesalahan, seperti jika peserta didik meminjam penghapus temannya maka harus mempunyai sikap tanggung jawab untuk menjaga penghapusnya sampai dikembalikan kepada pemiliknya dan bertanggung jawab untuk menggantinya jika penghapusnya hilang sebab keteledorannya.

Oleh karenanya, meminimalisir hilangnya rasa tanggung jawab dari peserta didik atas peralatan atau ATK setiap masing-masing peserta didik adalah sekolah menyediakan koperasi ATK dan guru mewajibkan kepada peserta didik untuk melengkapi seluruh perlengkapan belajarnya.

f. Kerja keras

Nilai kerja keras dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam diri peserta didik. Misalnya dalam melakukan sesuatu harus menghargai prosesnya bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas,

serta belajar dan mengerjakan tugas - tugas akademik dengan usaha dan hasil kerja kerasnya sendiri.

g. Sederhana

Nilai kesederhanaan dapat diterapkan peserta didik diantaranya dalam bentuk hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan dan sebagainya. Selain itu penanaman nilai kesederhanaan di SD Ar Roudhoh telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya tata tertib sekolah, pemakaian seragam dengan lengkap dan rapi, tidak bermewah-mewahan dengan memakai perhiasan yang berlebihan, tidak membawa make up ke sekolah, melarang siswa untuk membawa uang saku secara berlebihan dan larangan untuk bersikap sombong.

h. Keberanian

Nilai keberanian dapat diwujudkan peserta didik diantaranya melalui berani mengatakan dan membela kebenaran, berani bertanggung jawab terhadap segala bentuk kesalahan, berani menyampaikan pendapat, berani maju ketika guru menyuruh presentasi ataupun menulis dipapan tulis, dan selalu bersikap berani ketika tidak sedang melakukan kesalahan.

i. Keadilan

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh peserta didik diantaranya melalui bentuk memberikan saran perbaikan dan semangat pada temannya yang tidak berprestasi, tidak memilih teman dalam bergaul berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Berdasarkan data yang sudah disajikan, nilai-nilai yang dikembangkan dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan ditanamkan melalui perilaku peserta didik yang tercermin dalam nilai yang bersifat karakter, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, angung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut telah ditanamkan secara berkelanjutan ke dalam diri seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan penunjang dari kebijakan pendidikan anti korupsi dan tata tertib sekolah.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menginternalisasikan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pembelajaran PAI Di SD Ar Roudhoh Beji

Dalam internalisasi pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran PAI di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan tentu memiliki dukungan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung yang ada akan mendorong kemajuan dari internalisasi pendidikan anti korupsi, sementara faktor penghambat akan menjadi penunda keberhasilan internalisasi pendidikan anti korupsi.

1. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor yang mendukung internalisasi pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran PAI di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan. Diantaranya adalah adanya partisipasi dan dukungan warga sekolah. Peserta didik turut berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Kemudian guru juga turut mengajarkan dan memberikan contoh yang baik untuk dijadikan teladan oleh peserta didik.

Selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana yang dimaksud ialah adanya kantin kejujuran dan adanya modul pendidikan anti korupsi untuk masing-masing peserta didik serta adanya berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi untuk menjadi pengingat warga sekolah agar lebih memahami mengenai nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi. Sedangkan untuk prasarananya, yaitu adanya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai seluk beluk tindakan korupsi, bagaimana cara pencegahannya serta nilai-nilai karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik.

2. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung internalisasi pendidikan anti korupsi di SD Ar Roudhoh, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Diantaranya ialah kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pendidikan anti korupsi. Kemudian dikarenakan setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, hal inilah yang menjadi penyebab adanya perbedaan karakter pada setiap peserta didik.

Faktor penghambat lainnya terkait buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi yang terbatas. Walaupun untuk sekolah sudah diberikan modul pendidikan anti korupsi tetapi minat baca anak masih kurang.

Sejauh ini agen pelaksana kebijakan pendidikan anti korupsi di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan telah melakukan tugas dan fungsinya namun belum maksimal, karena masih ada beberapa oknum guru dan peserta didik yang belum mematuhi aturan. Misalnya masih ada peserta didik yang tidak jujur ketika membeli di kantin kejujuran, berbuat curang di kelas, serta masih ada peserta didik dan oknum guru yang datang terlambat ke sekolah.

Serta dari pengamatan peneliti, sarana terkait pendidikan anti korupsi kurang maksimal, karena untuk penempatan *banner* ataupun slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah ataupun di luar kelas masih kurang serta jumlahnya masih sedikit.

KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi (PAK) di SD Ar Roudhoh Kabupaten Pasuruan sudah diinternalisasikan dengan baik, dilaksanakan setiap Sabtu setelah pembelajaran P5, sesuai dengan kurikulum merdeka. Sekolah menggunakan slogan dan gambar sebagai pengingat untuk menjauhi perilaku koruptif. Materi PAK disusun sistematis dengan modul bahan ajar, memudahkan guru dalam menjelaskannya. Materi mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kemandirian, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Program-program sekolah, seperti sosialisasi awal tahun dan kantin kejujuran, juga menerapkan nilai-nilai PAK. Sekolah memberlakukan hukuman bagi pelanggaran kedisiplinan, seperti mengulang bacaan kegiatan keagamaan bagi siswa yang terlambat masuk.

Selanjutnya faktor pendukung dalam menginternalisasikan pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran meliputi: modul ajar yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa, dukungan dari warga sekolah, komitmen sekolah dalam mempertahankan program kantin kejujuran, keaktifan guru dalam menyambut siswa di pagi hari, sosialisasi setiap awal tahun, serta sarana prasarana dan slogan/gambar yang mendukung di lingkungan sekolah. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang membuat internalisasi pendidikan anti korupsi kurang maksimal, seperti buku ajar yang terbatas, keterbatasan sarana prasarana, tanggapan siswa yang beragam karena latar belakang yang berbeda, kesulitan dalam mengkondisikan peserta didik saat sosialisasi, serta keterlambatan siswa dan guru serta kurangnya penyebaran slogan/gambar di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelya, N., Dany, M., Rahayu, D., Helmina, M., & Zahra, R. F. (2023). Penguatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Sekolah Sebagai Strategi Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 1005-1012.
- Aziz, A., Purnamasari, N. I., & AR, Z. T. (2021). Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Usia Dini di Tk Al Amin Klampis Bangkalan. *Aulada: Jurnal Pendidikan dan Perkembangan anak*, 3(1), 83-104.
- Baedowi, Ahmad. 2015. *Potret Pendidikan Kita*. Ciputat: Pustaka Alvabet
- Budiman, A. (2021). *Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Efendi, Rinja dan Ningsih, Asih Ria. 2022. *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media
- Fernando, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022). Diseminasi simbolik: Makna korupsi dalam media sosial Instagram. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 079-094.
- Hadifa, La. 2019. *Membangun Budaya Anti Korupsi: Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Kendari: CV. Adiprima Pustaka
- Medan, D. Y. U. M. N. A. W. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkat Di Indonesia. *Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*, 16(1), 5210.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44.
- Putera, R. E., Yoserizal, Y., Putri, A. A., Purnama, T. H., Ariani, F., & Ahmad, T. (2023). Sosialisasi Dan Edukasi Integritas Anti Korupsi Era Revolusi Industri 4.0 Di Smpn 13 Kota Padang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 9927-9932.
- Raissoevel, N. F. (2022). *'pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020)* (Bachelor's thesis).
- Ramadhani, R. (2024). Formation Of Anti-Corruption Character In The Younger Generation Based On Pancasila Ideology. *JURNAL SETIA PANCASILA*, 4(2), 40-48.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Listianingsih, Dessy Marliani. 2022. *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Santoso, Ibnu. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, Cet I

Waluyo, Bambang. 2022. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika

Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26-42.